

Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan dan BPKAD Kabupaten Pinrang)

Said HM, Budiandriani, Suriyanti, Firman
Universitas Muslim Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pinrang selama tahun 2010 - 2014 dengan menggunakan rasio keuangan daerah (rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap total belanja) analisis *varians*, dan pertumbuhan. Data diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pinrang berupa dokumen resmi pemerintah daerah serta wawancara. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pinrang tahun 2010 - 2014 secara garis besar cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan didapatkannya hasil perhitungan terhadap rasio efektivitas, efisiensi, *varians* serta pertumbuhan yang cenderung baik.

Kata kunci : APBD Kabupaten Pinrang, rasio keuangan daerah

Copyright (c) 2023 Sukenda¹, Eka Angga L², M. Kohar³

✉Corresponding author :

Email Address : saidhm5577@gmail.com, budiandrianimt@umi.ac.id, suriyanti.mangkona@umi.ac.id,
firmanijaya@gmail.com

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal menyebabkan munculnya otonomi daerah sejak tahun 2001 sehingga daerah harus mampu mengelola keuangannya sendiri untuk membiayai urusan pemerintahannya. Konsep dasar dari otonomi daerah itu sendiri yaitu diberikannya kewenangan yang luas dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerahnya sehingga daerah akan menjadi kreatif dalam menciptakan kelebihan atas potensi yang dimiliki masing - masing daerah. Keuangan daerah merupakan salah satu aspek terpenting dalam pelaksanaan pemerintahan yang akan menjadi dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri sehingga harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang ada, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan bunyi pasal 4 Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan mampu tidaknya daerah tersebut membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan demi mensejahterakan masyarakatnya. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang dimaksud APBD yaitu rencana operasional keuangan daerah yang memuat perkiraan pengeluaran dan sumber-sumber penerimaan daerah. Struktur dari APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan daerah menurut Yuwono (2008:94) merupakan semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah tersebut dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan pemerintah tidak perlu membayarkan kembali atas penerimaan tersebut. Kelompok selanjutnya dari struktur APBD adalah belanja daerah. Belanja daerah terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Komponen terakhir dari APBD yaitu pembiayaan. Pembiayaan adalah komponen anggaran yang disediakan untuk menampung transaksi keuangan guna memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran serta penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun- tahun anggaran berikutnya. Pengelolaan APBD diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja. Analisis rasio merupakan salah satu cara dalam melakukan pengukuran kinerja keuangan daerah. Analisis rasio keuangan APBD dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode anggaran dengan periode anggaran sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan / tren yang terjadi dengan memahami dan menginterpretasikan hasil perhitungan rasio keuangan yang telah dilakukan untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah tersebut apakah alokasi APBD dapat dikatakan efektif dan efisien sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan yang nantinya akan dilakukan pengambilan keputusan tertentu guna meningkatkan kinerja keuangan daerah tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh PAD daerah Kabupaten Pinrang yang tergolong rendah sehingga tingkat ketergantungan

keuangan dari pusat dapat dikatakan masih tinggi walaupun setiap tahunnya tingkat PAD daerah ini memiliki kecenderungan yang positif (meningkat setiap tahunnya).

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus karena penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan kasus, mendeskripsikan dan kemudian menginterpretasikannya dengan memanfaatkan data yang berdasarkan pada angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa isu strategis terkait dengan kemiskinan di Kabupaten Pinrang yang tertuang dalam SKPD antara lain adalah adanya kesenjangan sosial yang masih tinggi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya kemampuan akses masyarakat miskin terhadap sumber pemodal dan peluang usaha, serta masih rendahnya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Terdapat hubungan antara konsentrasi penduduk miskin dan kondisi topografis wilayah Kabupaten Pinrang. Secara Topografis, Pinrang terdiri dari duapertiga bagian wilayah pegunungan (daerah kering dan kapur) , dan sepertiga wilayah dataran rendah (daerah pantai dan pertanian). Wilayah yang menjadi konsentrasi penduduk miskin yaitu berada di wilayah pegunungan. Kondisi ini yang menyebabkan rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sumber daya ekonomi. Sebagian besar penduduk miskin bermatapencarian sebagai petani. Jumlah tenaga kerja wanita (TKW) asal Pinrang jauh lebih banyak daripada jumlah TKI. Penyerapan tenaga kerja luar negeri terus meningkat hingga 92 persen dari total penyerapan tenaga kerja di Pinrang dan yang selalu mendominasi adalah tenaga kerja wanita. Besarnya jumlah TKW tidak selalu memberikan dampak positif pada kehidupan sosial masyarakat. Sejumlah kasus seperti penelantaran anak, kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian banyak terjadi di masyarakat sebagai dampak meningkatnya jumlah wanita yang meninggalkan keluarganya untuk bekerja sebagai TKW. Tenaga kerja wanita asal Pinrang sebagian besar bekerja pada sektor ekonomi dengan nilai tambah dan produktivitas yang rendah seperti pembantu rumah tangga dan buruh pabrik. dengan memperhatikan kinerja pendapatan daerah, kinerja belanja daerah, dan pembiayaan daerah maka secara umum kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Pinrang tahun 2010-2014 dapat dinilai cukup baik. Pendapatan daerah Kabupaten Pinrang setiap tahunnya memang mengalami peningkatan sehingga hasil perhitungan terhadap pertumbuhan pendapatan daerah yang cenderung meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 24,17% pada tahun 2014 dan hampir setiap periodenya pendapatan asli daerah yang diperoleh dapat melampaui target yang telah ditetapkan, terbukti dengan perhitungan terhadap rasio efektivitas PAD dari tahun 2010 sampai tahun 2014 cenderung cukup efektif yakni sebesar 87,84% ; 101,47% ; 102,78% ; 91,08%; 112,13%, namun penilaian terhadap kinerja pendapatan pada dasarnya tidak cukup hanya melihat apakah realisasi pendapatan daerah telah melampaui target anggaran, tetapi harus dilihat lebih

lanjut sumber pendapatan darimana yang paling berpengaruh. Pendapatan yang diterima Kabupaten Pinrang masih didominasi dari dana perimbangan, sehingga tingkat kemandirian Kabupaten Pinrang masih sangat rendah selama lima tahun dengan rata - rata rasio kemandirian sebesar 7,87%.

Mengenai kinerja belanja, daerah dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan sehingga efisiensi anggaran dapat tercapai. Selama lima tahun tersebut Kabupaten Pinrang mampu melakukan efisiensi anggaran yang terlihat pada perhitungan rasio efisiensi belanja daerah yang dihasilkan dibawah 100%, namun perlu diteliti lebih lanjut apakah realisasi belanja yang lebih rendah dari yang dianggarkan tersebut karena adanya efisiensi atautkah karena adanya program / kegiatan yang tidak dijalankan sehingga anggaran tidak terserap serta bagaimana pengalokasian belanjanya, apakah belanja langsung dan tidak langsung dapat seimbang, atautkah belanja hanya terfokus pada belanja tidak langsung saja. Belanja pemerintah Kabupaten Pinrang selalu didominasi oleh belanja tidak langsung namun Pinrang berhasil melakukan penghematan belanja, hal tersebut ditunjukkan dengan dijalankannya seluruh program/kegiatan yang telah dianggarkan

Pembiayaan daerah yang aktif dilakukan tahun 2010-2014 yakni penggunaan SILPA, penerimaan piutang, dan penyertaan modal pemerintah daerah. Dalam kebijakan ini, pemerintah dapat dinilai cenderung baik. Pemerintah aktif dalam mengembangkan perusahaan daerah dengan selalu menyertakan modal setiap tahun anggarannya serta cenderung meningkatnya pertumbuhan SILPA yang menunjukkan kinerja keuangan semakin meningkat dan SILPA tersebut digunakan menjadi strategi pemerintah untuk menutup defisit anggaran selama ini.

SIMPULAN

- a) **Pendapatan Daerah**
Tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Pinrang selama lima tahun masih sangat rendah walaupun setiap tahunnya PAD yang dihasilkan cenderung mengalami peningkatan. Kemampuan pemerintah dalam merealisasikan PAD yang ditargetkan cenderung baik, pemerintah juga telah efisien dalam pengelolaan keuangan daerah, namun pendapatan daerah yang diperoleh masih didominasi oleh dana perimbangan.
- b) **Belanja Daerah**
Pemerintah daerah selalu melakukan penghematan belanja, terbukti dengan tidak pernah terlampauinya jumlah belanja yang dianggarkan, namun dalam pengalokasian belanjanya pemerintah daerah masih kurang tepat.
- c) **Pembiayaan Daerah**
Selama lima tahun terakhir APBD Kabupaten Pinrang selalu mengalami defisit anggaran sehingga harus melakukan penerimaan pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran tersebut salah satunya dengan penggunaan SILPA yang setiap tahunnya cenderung meningkat.

Pada pengeluaran pembiayaan, pemerintah daerah aktif dalam memajukan perusahaan daerah, terbukti dengan selalu menyertakan modalnya untuk unit usaha tersebut.

- a) Kabupaten Pinrang sebaiknya melakukan ekstentifikasi guna optimalisasi pendapatan asli daerahnya yaitu dengan mengelola potensi pariwisatanya. Dalam pengelolaannya Kabupaten Pinrang dapat bekerja sama baik dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Perusahaan Swasta.
- b) Belanja tidak langsung sebaiknya dapat ditekan sehingga antara belanja langsung dan tidak langsung dapat seimbang atau bahkan memprioritaskan pada belanja langsung agar pembangunan daerah dapat segera terlaksana.
- c) SKPD Kabupaten Pinrang sebaiknya lebih aktif dalam mengadakan program-program kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dalam jangka panjang, misalnya dengan mengintegrasikan sektor primer dengan sektor industri pengolahan. Keterkaitan antar sektor ini masih perlu ditingkatkan secara terus menerus, dimana saat ini hasil – hasil pertanian maupun pertambangan masih di pasarkan dalam bentuk bentuk bahan baku yang belum memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Maka diperlukan kebijakan yang mampu merangsang minat kreatif dari masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah produk dimaksud melalui pengolahan hasil – hasil pertanian dan pertambangan.

Referensi :

- Adisasmita, Rahardjo, 2014, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adiyatullah, Hasby, 2011, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Anonim, *Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, 2006, Jakarta.
- Anonim, *Peraturan Menteri Dalam Negeri No.22 Tahun 2011 Tentang Proses Penyusunan dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2012*, 2011. Jakarta
- Anonim, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 4 Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*. 2000, Jakarta.
- Anonim, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Ketentuan Penyusunan dan Penetapan APBD*, 2003, Jakarta.
- Anonim, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Diamandemen menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah*, 2008, Jakarta.
- Anonim, *Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010*, 2010, Pinrang.
- Anonim *Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011*, 2011, Pinrang.
- Anonim *Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012*, 2012, Pinrang.

- Anonim *Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013, 2013*, Pinrang.
- Anonim *Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014, 2014*, Pinrang
- Aprianti, Dian, 2012, *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Hasil Pemekaran di Sumatera Selatan Tahun 2009 - 2011*. Malang : Universitas Brawijaya
- Bastian, 2006, *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Djumhana, Muhammad, 2007, *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Febriyanti, Ayu, 2013, *Analisis Kinerja Keuangan*
- Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011. Malang: Universitas Brawijaya
- Halim, Abdul, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Jakarta: PT Gramedia
- Mahmudi, 2007, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UUSTIMYKPN
- Mahmudi, 2010, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN
- Mahsun, Mohammad, 2006, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI
- Marselina, Djayasinga. 2007. Riset Anggaran untuk Rakyat Studi Kasus: APBD Kota Bandar Lampung. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Volume 12. No.1. pp. 48-79
- Prabowo, Zulkifly, 2013, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2007 - 2011*. Malang : Universitas Brawijaya
- Pramono Hariadi, Yanuar Restianto, Icuk Rangga Bawono, 2010, *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Sony Yuwono, Dwi Cahyo Utomo, H Suheiry Zein, H Azrafiany A.R, 2008, *Memahami APBD dan Permasalahannya*. Malang: Banyumedia Publishing
- Ulum, Ihyaul, 2012, *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wulandari, Anita, 2001, *Kemampuan Keuangan Daerah*. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. Volume 5
- www.Pinrangkab.go.id. (Diakses pada 30 November 2015)